

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatur Rosidah. Analisis *Fiqh Siyasah* Dusturiyah tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).
- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". (*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli (gramedia.com)*), diakses 26 Agustus 2023
- Antari, K.W, Ratna Artha, Dewa Gede Sudika. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah". *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 2. (2019).
- Arista, Meika. "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?". Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-1t5c860ff16a550> . diakses pada 14 Februari 2024.
- Chandra, M, Vera Bararah, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Vol. 19 No. 1, (2022). dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790/pdf>,
- Dahliah. Metode Penyelesaian Ta'arudh al-adillah dan implikasibya terhadap penetapan hukum islam), (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2013).
- Djazuli, A. 2005. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Fajar Dina, Haris Retno, Rini Apriyani. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 2, (2020). dalam <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/PDF/198/1371>
- Fajrin, Vita. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi". (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).
- Fatmawati. 2015. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almailda. 2015.

- Grisminarti, S. “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. (Skripsi, UII, 2019).
- Gusmansyah, W. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol.2 No.2, (2017). dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>,
- Hamzani, Achmad Irwan. 2018. *Asas-asas Hukum (Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hanafi, Muhammad Fikri, Sunny Ummul Firdaus. “Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1 No.1, (2022). dalam https://journal.uns.ac.id/Souve_reignty/article/view/192.
- Hasbi, Alimuddin. 2018. *Fiqh Siyasah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Hermansyah, Fendi. “KPU Paparkan Rancangan Aturan Pencalonan DPR-DPRD ke Komisi II DPR”. dalam *KPU Paparkan Rancangan Aturan Pencalonan DPR-DPRD ke Komisi II DPR - Radar Mojokerto (jawapos.com)*, diakses pada 25 November 2023
- Humas MKRI, “Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2> , diakses pada 20 November 2023
- Husein, Muhammad. “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi pada PKPU Nomor 22 Tahun 2018”. (Skripsi, 2019)
- Indonesian Corruption Watch. “Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI”. dalam <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, diakses pada 23 November 2023
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang undangan*. Yogyakarta: kanisius.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail, Nur Hasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi- Politik*. Yogyakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM.
- Kanwil Kemenag Prov. Bangka Belitung. “Pandangan Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” dalam *Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pandangan Islam Terhadap*

Penyalahgunaan Narkoba (kemenag.go.id), diakses pada 30 Desember 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023

Kholbi Dimas Nur. “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. (Tesis UIN Sunan Ampel, 2019).

Kuning, Abdul Halim. Takwa dalam Islam, *Jurnal Istiqra’*. Vol. 7 No. 1, (2018).
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/476/389/>.

Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Mardiyati, Siti, Warmiyana. 2022. *Ilmu Perundang-undangan*. Purbalingga: Eurika Media Aksara

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum. “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” dalam *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (kemenkumham.go.id)*. diakses pada 28 November 2023

Mochtar, Zainal Arifin. “Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*. Vol.1 No. 3. (2015). dalam <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/112>

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Muliawati, Anggi . "KPU Gelar Uji Publik PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2024". dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6606887/kpu-gelar-uji-publik-pkpu-pencalonan-anggota-dpr-dan-dprd-pemilu-2024>, diakses pada 25 November 2023.

Munawir, Yusron. “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024. “*Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 3 No.2. (2023).

Otto, Jan Michiel. 2012. *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*. Bali: Pustaka Larasan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022

- Purnamasari, Dian Dewi. "Surat Dinas KPU Untuk Partai Politik" dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/04/surat-dinas-kpu-untuk-partai-politik>, diakses pada 28 November 2023
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 3, (2021).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Safudin, E. "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)". *Journal of Law & Family Studies*. Vol.2 No. 2. (2020). dalam <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/259/2>
- Sanur Adlan dan Andriko. Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.03, No.1, (2018). ejournal.iainbukittinggi.ac.id
- Sikumbang, Sony Maulana, dkk. *ilmu perundang-undangan*. Universitas Terbuka.
- Simamora, Yalid Birman. "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan". *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 19 No.2, (2021). dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/12175/7781>
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Subarkah, Tri. "Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini penjelasan KPU". dalam <https://www.medcom.id/nasional/politik/GNGDz4pb-eks-koruptor-boleh-nyaleg-ini-penjelasan-kpu> . diakses 14 Februari 2024.
- Swararahima, "Baligh Perspektif Fiqh", dalam <https://swararahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/> , diakses pada 30 Desember 2023

- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Tinangon, Meidi Yafeth. “PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses 20 November 2023.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
- Wahdini, Muhammad. Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam. *Istiqra': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol.6 No.1 (2020). dalam <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/559/383>.
- Wiryani, Made. 2022. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Yudeman, Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum islam, *Jurusan syari'ah STAIN Kerinci*, vol.11 2014, hal. 9
- Zakaria. “Peradilan dalam Politik Islam”. dalam <https://pajakartautara.go.id/peradilan-dalam-politik-islam/>, diakses pada 27 Agustus 2023